

LAPORAN WEBINAR SATU DATA INDONESIA

Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Kamis, 30 September 2021 – Pukul: 13.00-15.30

PENDAHULUAN

Satu Data Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk mendorong hadirnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaiakan. Harapannya melalui kehadiran Satu Data Indonesia dapat membantu para pengambil keputusan untuk memilih keputusan yang sesuai dengan kondisi yang akurat. Dalam webinar ini, Satu Data Indonesia menghadirkan Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data-data dalam pengambilan kebijakan, khusus dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

TUJUAN

Tujuan webinar ini adalah menunjukkan pentingnya serta luasnya penggunaan data yang dapat dilakukan dari hadirnya Satu Data Indonesia dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

PEMBAHASAN

1. **Bapak Taufik Hanafi** selaku Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Ketua Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas sebagai *keynote speaker* menyampaikan:
 - Kehadiran Satu Data Indonesia lebih dari sekedar penyediaan data, tetapi untuk membantu penyusunan perencanaan pembangunan, hingga memastikan proses perencanaan yang telah disusun dapat dimonitor dengan baik. Oleh sebab itu, Satu Data Indonesia akan fokus mendorong program-program prioritas, salah satunya dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
 - Dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021 dan 2022, pemulihan ekonomi menjadi perhatian pemerintah. Terdapat beberapa sasaran-sasaran yang diharapkan dapat dicapai di akhir tahunnya. Sebagai upaya mencapai sasaran-sasaran Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, dibutuhkan data-data yang akurat yang dapat membantu mencapai sasaran yang ditetapkan.
 - Dalam upaya Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, dibutuhkan data-data akurat yang nantinya akan membantu penyusunan strategis serta melakukan inovasi-inovasi dalam pemulihan ekonomi nasional.
 - Satu Data menjadi penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional karena dapat mendorong integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola dan interoperabilitas layanan pemerintah yang terintegrasi.

2. **Bapak Rofyanto Kurniawan** Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan paparan terkait Optimalisasi Data untuk Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

- Data digunakan untuk menyinergikan beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM dan Korporasi, Kesehatan, Insentif usaha, dan program prioritas. Program-program tersebut memerlukan data agar dapat dilakukan dengan tepat sasaran.
- Dalam melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian keuangan dengan kementerian lainnya telah menyusun berbagai macam program yang cakupannya mikro hingga makro untuk dapat mengakomodasi masyarakat yang masuk dalam *exclusion error* yang disebabkan data penduduk miskin Indonesia belum tersusun dengan baik.
- Kementerian keuangan mendukung Data DTKS menjadi prioritas supaya memperbaiki data kemiskinan dengan tujuan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, walaupun waktu yang diperlukan untuk mengakomodasi data-data tersebut membutuhkan waktu yang panjang.
- Pemerintah perlu membangun sistem *Social Registry* untuk mengintegrasikan beragam data guna mendukung sistem penyesaran nasional. Dengan terintegrasinya data-data sosial maupun kependudukan, dapat tersedia data yang seragam antar kementerian/lembaga.

3. **Bapak Moh. Edy Mahmud**, Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik, memaparkan:

- Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki tanggung jawab untuk menyediakan statistik dasar yang disediakan secara berkala. Statistik tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur perkembangan indikator makro ekonomi nasional, alat keperluan monitoring pemulihan ekonomi nasional, serta sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).
- Dalam upaya pemulihan ekonomi, Badan Pusat Statistik melakukan Survei *Online* terhadap beberapa hal, yaitu: (1) Survei perilaku masyarakat pada masa pandemi COVID-19; (2) Survei terhadap pelaku usaha; (3) Survei sosial demografi dampak COVID-19. Survei-survei ini digunakan untuk mendorong pengambil keputusan dalam pemulihan ekonomi nasional.
- Badan Pusat Statistik memprakarsai pemanfaatan *Big Data* sebagai *Official Statistics* dalam pengambilan keputusan pemerintah. Namun hingga kini terdapat beberapa kendala untuk mendorong big data sebagai *official statistics*, yaitu: kualitas data, aksesibilitas, data management, hingga kompleksitas dari big data itu sendiri. BPS berencana pada tahun 2024 *Big Data* dapat digunakan untuk *Official Statistics* guna memenuhi prinsip data yang berkualitas.

4. Paparan Selanjutnya dibawakan oleh Bapak bambang Dwi Anggono, S.SOS., M.Eng, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengenai:
 - Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus melakukan dua hal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu pengembangan SDM di bidang Teknologi, serta mengembangkan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di daerah. Salah satu daerah yang menjadi fokus adalah Provinsi Bali, sebagai salah satu daerah yang ekonominya terdampak tinggi karena pandemi COVID-19.
 - Kominfo telah melakukan beragam pelatihan untuk meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Indonesia dengan tujuan akhir UMKM dapat mengadopsi Teknologi digital 4.0 di tahun 2024.
 - Dalam mengembangkan UMKM, ditemukan empat masalah utama UMKM yang ada di Indonesia ketika didorong untuk memanfaatkan teknologi digital, yaitu (1) Perlu investasi untuk mempercepat perputaran produksi dan penjualan; (2) Cakupan wilayah pemasaran yang terbatas, perlu dukungan Pemerintah; (3) Kualitas infrastruktur yang perlu ditingkatkan khususnya logistik dan internet; (4) Kualitas produk yang belum mampu bersaing secara internasional.
 - Salah satu program yang didorong Kominfo untuk meningkatkan digitalisasi UMKM adalah *Gerakan Ayo UMKM Jualan Online*. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat memiliki pasar yang luas, bahkan hingga di tingkat internasional. Harapannya, semakin besar pasar UMKM, akan semakin meningkatkan keuntungan yang didapat UMKM.
5. Setelah seluruh pemaparan disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan tanggapan dari **Bapak Ibnu Dwi Cahyo**, Juru Bicara Communication and InformationSystem Security Research Center. Dalam tanggapannya disampaikan:
 - Informasi terkait adanya Satu Data Indonesia belum digaungkan dengan maksimal kepada masyarakat, sehingga masih cukup asing didengar oleh masyarakat. Namun kedepannya, diharapkan SDI tidak hanya fokus dalam melakukan sosialisasi saja supaya SDI dapat diketahui masyarakat luas, melainkan SDI juga didorong untuk memastikan keamanan dari data yang dimiliki, hingga mendorong tata kelola Big Data yang dapat lebih baik dibandingkan dengan *start up* di Indonesia.
6. Selanjutnya tanggapan dibawakan oleh **Bapak Agung Indrajit**, Geospasial Advisor dari Badan Informasi Geospasial dan Anggota Sekretariat Satu Data Indonesia. Dalam tanggapannya disampaikan:
 - Terdapat kemajuan pengelolaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, salah satunya di Kabupaten Sumedang. Bersama dengan BPS Kabupaten Sumedang, pemerintah kabupaten mengumpulkan data-data untuk memastikan ketersediaan data Kabupaten Sumedang.

- Dalam mengembangkan Satu Data Indonesia, diperlukan akuntabilitas dalam tiga hal, yaitu Akuntabilitas dari Produsen sebagai penyedia data prioritas dan data induk, prioritas dari konsumen sebagai pengguna data dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan, serta akuntabilitas para pihak lainnya dalam mendorong kesuksesan Satu Data Indonesia di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

KESIMPULAN

Satu Data Indonesia sangat diperlakukan dalam pengambilan keputusan-keputusan di berbagai sektor pemerintahan. Hal ini perlu didorong segera agar data-data yang tersedia dapat semakin lengkap. Namun dalam pengembangan kedepannya, Satu Data Indonesia juga perlu mengembangkan sistem keamanan data, sosialisasi, serta pengembangan Big Data yang dapat lebih baik dibandingkan sektor swasta.

DOKUMENTASI



PERAN KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DALAM Mendukung PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL









PERAN KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DALAM Mendukung PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL





PRAKARSA PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK *OFFICIAL STATISTICS*



Isu Strategis

- Kendala dalam pemanfaatan big data untuk official statistics:
 - Kualitas data
 - Aksesibilitas (legal aspect, privacy security)
 - Data management (storage, processing)
 - Kompleksitas dari big data
- Belum ada panduan resmi dari UN dalam pemanfaatan big data untuk official statistics

Target Utama



Outcome 2024 - dst





